

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ratifikasi ACTIP oleh Filipina pada tahun 2017 dapat dipahami melalui tiga perspektif utama dalam hubungan internasional, yaitu realisme, liberalism, dan konstruktivisme. Dari pandangan realisme, langkah Filipina merupakan strategi untuk mengamankan kepentingan nasional dalam artian sederhana yaitu menjaga stabilitas domestik, mengontrol ancaman kejahatan transnasional, melindungi reputasi negara pengirim pekerja migran, serta memperkuat posisi tawar dalam kerjasama kawasan. Ratifikasi ACTIP dipandang sebagai cara Filipina memastikan keamanan nasional dan legitimasi politik, sekaligus mencegah isolasi dalam dinamika ASEAN. Sedangkan, perspektif liberalisme menekankan bahwa keterlibatan Filipina dalam ACTIP mencerminkan keyakinan pada pentingnya kerjasama multilateral dan aturan internasional untuk mengatasi masalah global. Perdagangan orang dianggap sebagai tantangan lintas batas yang hanya dapat diselesaikan melalui koordinasi antar negara, peran organisasi internasional, dan partisipasi aktor non-negara. Ratifikasi ACTIP dipahami sebagai komitmen Filipina untuk memperkuat rezim internasional anti perdagangan orang, membangun mekanisme perlindungan migran, serta mendorong stabilitas ekonomi-politik melalui tata keola berbasis aturan.

Sementara itu, konstruktivisme menyoroti dimensi normatif dan identitas. Bagi Filipina, ratifikasi ACTIP bukan hanya soal kalkulasi strategis atau ekonomi, melainkan bagian dari proses internalisasi norma internasional yang menempatkan perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Tekanan dari aktor transnasional seperti NGO, laporan TIP, dan organisasi internasional membentuk perspektif bahwa kepatuhan pada ACTIP adalah bentuk konfirmasi identitas Filipina sebagai negara demokratis, beradab, dan bertanggung jawab dalam komunitas ASEAN maupun internasional. Dengan demikian, ketiga

perspektif memberikan lapisan pemahaman yang saling melengkapi. Realisme menekankan aspek keamanan dan kepentingan material. Liberalisme menyoroti pentingnya institusi, kerja sama, dan aturan bersama. Sedangkan, konstruktivisme menggarisbawahi peran norma, identitas, dan legitimasi internasional. Keseluruhan perspektif menunjukkan bahwa kepentingan nasional Filipina dalam ratifikasi ACTIP adalah hasil dari kombinasi antara kebutuhan strategis, dorongan institusional, dan tekanan normative yang bersama-sama membentuk kebijakan luar negeri Filipina dalam menghadapi isu perdagangan orang.

5.2 Saran

Harapannya penelitian ini dapat menjadi pemahaman mengenai kebijakan dan respon hingga alasan kepentingan nasional dibalik ratifikasi ACTIP oleh Filipina pada tahun 2017. Untuk pengembangan dan penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan penelitian diperluas menjadi analisis studi terhadap kasus-kasus perdagangan orang. Para akademisi dapat melakukan kontinuitas atas kajian ini, khususnya mengenai perkembangan perdagangan orang menjadi fenomena praktik seks virtual yang telah dijadikan sebagai pekerjaan dalam prostitusi secara daring. Hal tersebut menjadi fenomena yang ramai selama satu dekade terakhir. Tentunya, dengan kemajuan teknologi dan alat komunikasi virtual dibutuhkan koordinasi negara negara dalam menangani dan memutuskan batasan yurisdiksi dalam konteks ruang virtual.